

**KEDUDUKAN MUKIM DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM SOSIAL
MASYARAKAT DI KECAMATAN LAUT TAWAR
KABUPATEN ACEH TENGAH**



SKRIPSI

Oleh :

JULIAN ARIGASTIA.AZ

NPM : 10.851.0051

PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**KEDUDUKAN MUKIM DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM SOSIAL
MASYARAKAT DI KECAMATAN LAUT TAWAR
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

JULIAN ARIGASTIA.AZ

NPM : 10.851.0051

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sajarna
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Mukim Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah Dan Sistem Sosial Masyarakat Di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

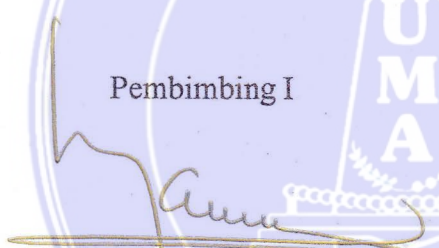
Nama : Julian Arigastia.AZ


NPM : 10.851.0051


Studi : Ilmu Pemerintahan

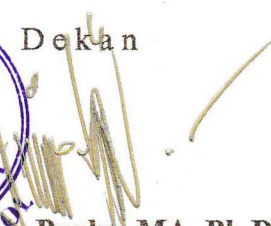
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Drs. Usman Tarigan M.S

Pembimbing II

Rudi Salam Sinaga, S.sos, M.Si



Dekan

Drs. Amir Purba, MA. Ph.D



Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2014



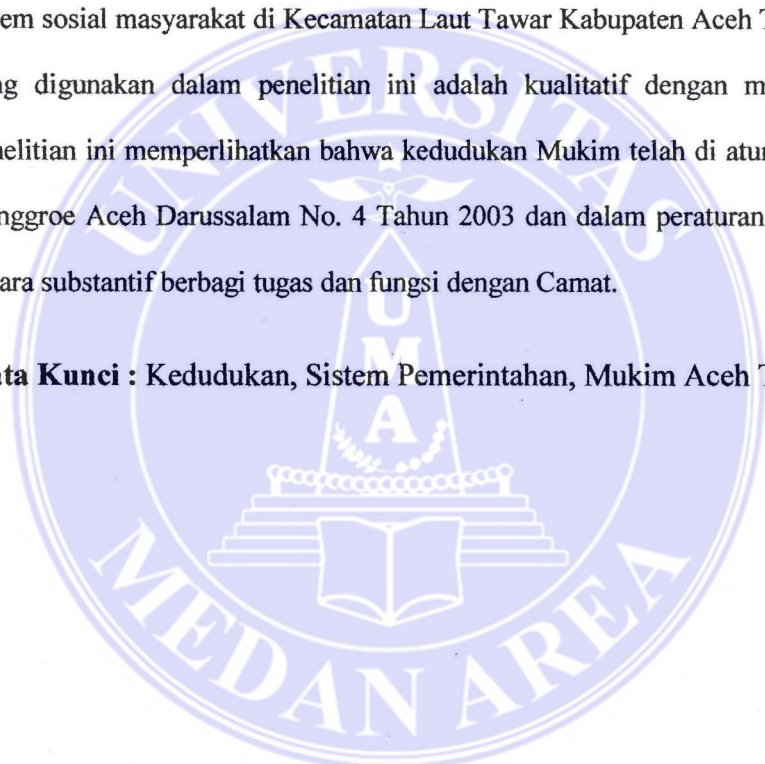
JULIA N. ARIGASTIA.AZ

NPM : 10.851.0051

ABSTRACT

Pasca munculnya perdamaian di Aceh yang berakibat terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) maka terjadi perubahan bentuk struktur sistem politik di Aceh seperti adanya partai politik lokal, namun tidak merubah sistem budaya yang telah ada seperti keberadaan istilah Mukim dalam struktur pemerintahan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedudukan Mukim dalam perspektif pemerintahan daerah dan sistem sosial masyarakat di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kedudukan Mukim telah di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 dan dalam peraturan daerah (PERDA) yang secara substantif berbagi tugas dan fungsi dengan Camat.

Kata Kunci : Kedudukan, Sistem Pemerintahan, Mukim Aceh Tengah.



KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “ Kedudukan Mukim Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Sosial Masyarakat di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”, dimana karya tulis ini disusun dalam bentuk Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai S-1 Universitas Medan Area (UMA) program studi Ilmu Pemerintahan (IP).

Penulis sangat menyadari bahwa proses penulisan Skripsi ini tidak terlaksana dan diselesaikan tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua ku, Azhar Basri dan Zaidar yang tak henti-hentinya mencurahkan do'a, cinta dan semangat bagiku serta banyak berkorban untuk dapat melihat keberhasilanku hari ini. Terimakasih banyak papa, mama. Semoga karya kecil ini dapat menorehkan bangga di hati kalian berdua.
2. Abangnda tertuaku, Ariza Tuahmi.AZ, kakak ku Arini Simahara.AZ, dan adik-adikku; Dara Arigustika.AZ dan si bungsu Ari Rizkie Bugeara.AZ yang teramat sangat aku sayangi. Tanpa dukungan kalian semua mungkin saat ini

aku tidak bisa menjadi seperti ini. Terimakasih buat semangat dan dukungan yang kalian berikan sampai dengan hari ini. Kalian saudara terhebat yang diberikan Allah SWT kepadaku. Lav yu ma bro n sistaa..^^

3. Bapak Drs. Amir Purba, MA. Ph.D selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan. M.S selaku pembimbing I skripsi yang dengan rela dan sabar, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rudi Salam Sinaga. S.Sos, M.si selaku pembimbing II yang dengan rela telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, menyumbangkan tenaga dan fikiran serta saran dalam mempercepat penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staff Tata Usaha terutama Bapak Masana Sembiring dan bang Wanda yang telah banyak membantu dalam menyiapkan keperluan administrasi proses sidang meja hijau penulis.
7. Bapak Kharimansyah.SE.MM selaku Asisten I yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya guna untuk melengkapi data skripsi ini.
8. Bapak Ir. Nasrun Liwanza. MM selaku Camat Laut Tawar yang bersedia dan membantu penulis dalam pengambilan data dan wawancara.
9. Bapak Haikal Sadiq selaku Mukim Laut Tawar yang bersedia memberikan pengetahuan kepada penulis tentang bagaimana Mukim di Aceh.

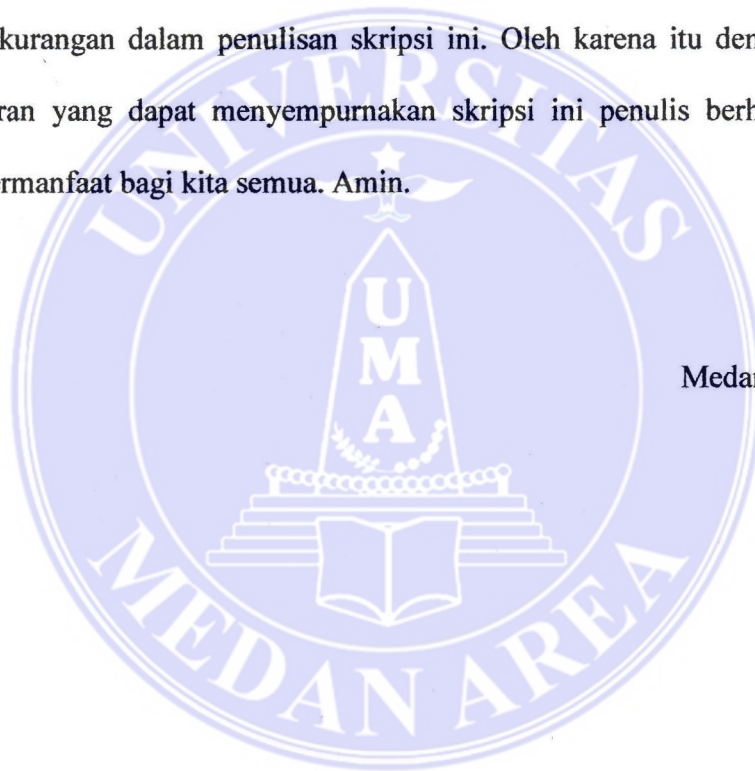
10. Bapak Jakfar, SE,MM selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang telah bersedia menyempatkan dan memberi arahan untuk proses pengambilan data di kantor.
11. Kepada abangnda sepupuku Iwan Sejahtera. S.IP. terimakasih telah memberi arahannya untuk skripsi ini,serta support dan motivasinya.
12. Teruntuk sahabat-sahabatku seperantauan Syahputra, Irfan Triarga, Handriza Rickie, Iwan ramadhansyah, Satria Afriza, Taufik Hidayat dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terima kasih telah setia membantu setiap kendala-kendala yang dihadapi penulis serta telah memberi support dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian Meen.
13. Rekan-rekan Angkatan 2010 dan se-almamater di Ilmu Pemerintahan UMA Hardi Pratama, Mustaqim, Laely Fitriansyah Gea, Muhamad Andika dan yang lainnya yang tidak dapat saya disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaannya dan kerjasama selama ini.
14. Terima kasih juga kepada abangnda Dodil atas segala pengorbananya, nasehat, motivasi dan supportnya
15. Terima kasih juga kepada adinda Afnizar atas segala nasehat, motivasi dan kesabaranya serta meberikan semangat kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dalam hidupku. Love you Mpeng..^^

16. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mungkin penulis lupa menyebutkan namanya karena tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh Bapak/Ibu dan rekan-rekan semuanya. Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Maret 2014

Penulis





DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Pembatasan Masalah.....	2
1.4 Rumusan Masalah.....	3
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	3
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	3
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Uraian Teori.....	5
A. Sistem Pemerintahan.....	5

	B. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	7
	1. Sistem Pemerintahan Orde Lama.....	11
	2. Sistem Pemerintahan Orde Baru.....	14
	3. Sistem Pemerintahan Reformasi.....	17
	C. Sistem Pemerintahan Aceh.....	19
	D. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.....	22
	E. Tujuan Desentralisasi.....	25
	F. Desentralisasi Dan Otonomi Desa.....	28
	G. Desentralisasi Dan Budaya Lokal.....	32
	H. Etno-Nasionalisme.....	36
	2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN.....	42
	3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	42
	3.2 Bahan Dan Alat.....	43
	3.3 Jenis Penelitian.....	43
	3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
	3.5 Defenisi Operasional Varibel.....	45
	3.6 Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
	4.1 Keadaan Geografis.....	47
	4.1.1 Letak Wilayah.....	47
	4.2 Keadaan Demografi.....	53
	4.2.1 Jumlah Penduduk.....	53

4.3	Sosial Ekonomi.....	54
4.3.1	Agama.....	54
4.3.2	Suku.....	55
4.3.3	Ekonomi.....	61
4.3.4	Pendidikan.....	62
4.3.5	Sarana dan Prasarana.....	63
4.4	Mukim.....	65
4.4.1	Susunan Organisasi.....	65
4.4.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	69
4.4.3	Harta Kekayaan dan Pendapatan Mukim.....	70
4.4.4	Tata cara pemilihan dan pembentukan Imum Mukim di Aceh.....	72
4.5	Kedudukan Mukim.....	82
4.6	Tugas dan Fungsi.....	84
4.6.1	Penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta urusan pemerintah lainnya.....	84
4.6.2	Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan Ekonomi, Pembangunan Fisik Maupun pembangunan Mental Spiritual.....	86
4.6.3	Pembinaan kemasyarakatan dibidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya Ketenraman dan ketertiban masyarakat.....	90

4.6.4	Peningkatan percepatan pelayanan kepada Masyarakat.....	104
4.6.5	Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan Menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-Persengketaan atau perkara adat dan hukum adat.....	105
4.6.6	Beberapa hasil observasi tentang kinerja Mukim Laut Tawar selama menjabat sebagai Kepala Mukim Di dalam Masyarakat.....	107
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	114
5.1	Kesimpulan.....	114
5.2	Saran.....	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	119



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1.1 Nama-nama Desa, Jumlah penduduk, Luas wilayah Masing-masing Desa yang dibawah Mukim Laut Tawar.....	48
Tabel 4.2.1 Jumlah Penduduk Kemukiman Laut Tawar.....	53
Tabel 4.2.2 Rincian Jumlah Penduduk Kemukiman Laut Tawar Dari Masing-masing Desa Berdasarkan sensus Penduduk Tahun 2014.....	53



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Mukim Laut Tawar, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN/RISET**
 - a. Kantor Kecamatan Lut Tawar.
 - b. Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung.

- 2. SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA**
 - a. Sekertaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Camat Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
 - c. Mukim Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

- 3. PETA PROVINSI ACEH TENGAH.**

- 4. PETA DESA-DESA DI TAKENGON.**

- 5. QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PROVINSI NANGGORE ACEH DARUSALAM.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan pemerintahan pada masa orde baru terkesan terlalu otoriter dan cenderung memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Hal tersebut pada akhirnya memunculkan ketidakpuasan masyarakat atau daerah yang merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat selama lebih dari tiga dasawarsa. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang besar ditingkat desa, diantaranya adalah birokratisasi dan terjadinya koorporatisme desa. Ada pun bukti dari birokrasi desa tersebut adalah adanya peneragaman ditingkat desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga menghambat perkembangan desa supaya lebih maju. Namun hal tersebut dapat berubah dengan dimulainya era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru yang berkuasa lebih dari tiga dasawarsa pada pertengahan Mei tahun 1998.

Perubahan tersebut terjadi di berbagai bidang, salah satu contoh adalah adanya perubahan kekuasaan melalui reformasi politik. Pada kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada, kita dapat melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan

mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Pasca munculnya perdamaian di Aceh yang berakibat terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) maka terjadi perubahan bentuk struktur sistem politik di Aceh seperti adanya partai politik local, namun tidak merubah system budaya yang telah ada seperti keberadaan istilah Mukim dalam struktur pemerintahan di Aceh. Mukim sebagai fenomena adanya pendekatan budaya dalam membentuk struktur sistem politik (pemerintahan) maka dengan uraian diatas akan dilakukan penelitian Kedudukan Mukim dalam prespektif sistem pemerintahan daerah dan sistem sosial masyarakat Aceh Tengah (studi kedudukan Mukim dan Relasinya terhadap kekuasaan politik lokal di Kemukim Laut Tawar. Kecamatan Laut Tawar. Kabupaten Aceh Tengah).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Keberadaan Mukim dalam struktur sistem pemerintahan perlu diketahui.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

1. Penelitian ini dilakukan di Kemukiman Laut Tawar. Kecamatan Laut Tawar, Kabupten Aceh Tengah.
2. Mukim yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampoung (Desa) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winama, Surya. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta : UUP AM YKPN.
- Amirin, Tatang. 1996 *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Ctk, Keenam, Jakarta : Rajawali Press.
- A. Hamid S. Atamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang berfungsi Sebagai Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita II*. Jakarta : fakultas pasca sarjana UI.
- Purwaningsih, Titin. 2008. *Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Diktat Mata Kuliah.
- Handoyo, Cipto, Hestu. 2003. *Hukum Tata Negara Kewarganegaraan (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi)*. Yogyakarta : UAJY.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta : LIPI Press.
- Hiarriej, Erick dan Martanto, Ucu dan Musyaddad Ahmad. 2004. *Politik Transisi Pasca Soeharto*. Yogyakarta : FISIPOL UGM.
- Huda Ni'Matul. 2005. *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Mahmud dan Pinan, Aman Hakim. 2002. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takegon, Aceh Tengah : Yayasan Maqamam Mahmuda
- Kusnardi, Moh Dan Ibrahim, Harmaly. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FU UI dan CV. Sinar Bakti.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Lexy, Moleong. 1993. *Motode Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Purwastuti, Andriani. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : UNY Press.

Nor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta : Interpena.

Pamudji. S. 1985. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta : Bina Asrama.

Poerbobranoto, Koentjoro, 1978, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung : Eresco.

Guzman dan Reforma. 1993. *Decentralization Towards Democratization and Development*. Manila : EROPA Secretariat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, No. 4 Tahun 2003, *Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam : Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*.

Syarie, Kencana, Inu. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Eresco.

Sumber Sapirin. 1997. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Undang-undang :

UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara :

Haikal Sadiq, (Takengon. 2014).

Kharimansyah.SE.MM, (Takengon. 2014).

Nasrun Liwanda, (Takengon. 2014).

Hasbullah Djakfar, (Takengon. 2014).

Alamat Web-Site :

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Sunarso,%20M.Si./Buku%20PSP.pdf>. Diakses Pada tgl, 03-12-2013, Pkl 20:14 Wib.

[http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/mnoor_buku_memahami_desentralisasi_indonesia%20\(02-02-13-08-47-07\).pdf](http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/mnoor_buku_memahami_desentralisasi_indonesia%20(02-02-13-08-47-07).pdf). Diakses pada tgl, 03-12-2013, Pkl 18:17 Wib.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN LUT TAWAR

Jl. Takengon - Bintang No. Telp : (0643) 22259 Fax : (0643) 22259 Dedalu

Nomor : 141/ 153/ CLT/2014
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Penelitian**

Takengon, 24 Februari 2014

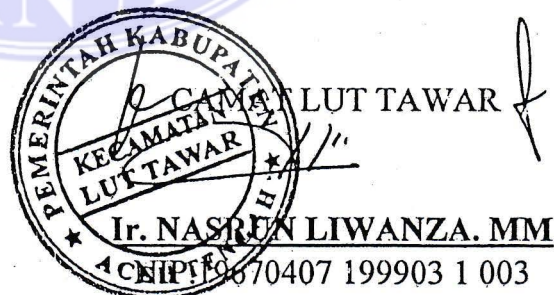
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Fisipol
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Medan Area
Di -
Tempat

Camat Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa kepada nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : JULIAN ARIGASTIA AZ
Nomor Pokok Mahasiswa : 108.510.051
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar nama tersebut di atas telah mengadakan penelitian tentang "Kedudukan Mukim Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Sosial Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah". Guna untuk melengkapi sumber data sebagai bahan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

فمړنته كېوفاتن اچيه تنه
بادان فمېرداڤاڤان مشراكتدان فمړنته ان كمفغ

Jalan Pahlawan No. 737 Telp. (0643) 21046 Takengon

Nomor : 423.6/ 05 /BPMPK
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Pengambilan Data

Takengon, 3 Maret 2014
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Fisipol
Universitas Medan Area

di -
Medan

Bahwa benar nama tersebut di bawah ini :

Nama : JULIAN ARIGASTIA.AZ
NPM : 10.851.0051
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
Universitas : Medan Area

Telah melakukan Pengambilan Data Mukim Kecamatan Lut Tawar untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Kedudukan Mukim Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Sosial Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah".

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
KABUPATEN ACEH TENGAH



JAKFAR, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19560404 198010 1 001



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor : 076 /F.5/I.2.b/20014
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data

20 Februari 2014

Kepada : Yth, Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah
Di -
Takengon

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Julian Arigastia. Az
Nomor Pokok Mahasiswa : 10.851.0051
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi/Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul : "**Kedudukan Mukim Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Sosial Masyarakat Di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak pimpin.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Cc : File,-